

CIVIL SOCIETY SEBAGAI MEDIATOR SOSIAL: STUDI PERAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN OKU DALAM MENDORONG DIALOG ANTARA PEMERINTAH DAN WARGA

Aulia Vitari^{1*}, Mila Sari², Imelda Azazilia³, Eriyansyah⁴, Redo Putra⁵, Eva Susanti⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas
Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Indonesia

Email: liarunika@gmail.com^{1*}, itsmilasr10@gmail.com², azazilia123@gmail.com³,
eriyansyah24@gmail.com⁴, redop2850@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Muhammadiyah sebagai aktor masyarakat sipil dalam menengahi hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan wawancara, serta kajian pustaka, penelitian ini mengeksplorasi secara mendalam dinamika interaksi antara Muhammadiyah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta bagaimana organisasi ini berkontribusi dalam membangun ruang dialog yang partisipatif dan konstruktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemimpin Muhammadiyah dan analisis literatur akademis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah memainkan peran strategis sebagai mediator sosial melalui advokasi kebijakan, memfasilitasi dialog publik, dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara terstruktur. Namun, peran ini menghadapi tantangan seperti akses formal yang terbatas, resistensi birokrasi, dan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas organisasi. Penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong tata kelola yang lebih inklusif dan demokratis.

Kata Kunci: *Civil Society*, Muhammadiyah, *Social Mediator*, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

ABSTRACT

This study aims to examine the role of Muhammadiyah as a civil society actor in mediating relations between the local government and the community in Ogan Komering Ulu (OKU) Regency. Using qualitative research methods and an interview approach, as well as a literature review, this study explores in depth the dynamics of interactions between Muhammadiyah, the local government, and residents, and how this organization contributes to building a participatory and constructive dialogue space. Data collection

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

techniques were carried out through in-depth interviews with Muhammadiyah leaders and analysis of relevant academic literature. The results of the study indicate that Muhammadiyah plays a strategic role as a social mediator through policy advocacy, facilitating public dialogue, and conveying community aspirations in a structured manner. However, this role faces challenges such as limited formal access, bureaucratic resistance, and the need for strengthening organizational capacity. This study emphasizes the importance of strengthening partnerships between the government and civil society organizations to promote more inclusive and democratic governance.

Keywords: *Civil Society, Muhammadiyah, Social Mediator, Kabupaten Ogan Komering Ulu.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi yang sehat, partisipasi masyarakat menjadi elemen krusial dalam proses pengambilan kebijakan publik. Salah satu aktor penting dalam mendorong partisipasi tersebut adalah *civil society*, yang berperan sebagai jembatan antara negara dan masyarakat. Di Indonesia, peran *civil society* semakin signifikan dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas kebijakan publik, terutama dalam konteks pemerintahan daerah. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia.

Tidak hanya dikenal dalam bidang pendidikan dan kesehatan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai mediator sosial yang mampu menjembatani kepentingan warga dengan pemerintah, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan salah satu wilayah di Sumatera Selatan yang memiliki dinamika sosial-politik tersendiri. Dalam konteks lokal ini, Muhammadiyah hadir tidak hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor *civil society* yang aktif dalam berbagai forum pembangunan daerah, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dialog publik, dan advokasi kebijakan. Namun, sejauh mana peran Muhammadiyah dalam mendorong dialog antara pemerintah dan warga masih belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Muhammadiyah menjalankan fungsi mediasi sosialnya, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal di Kabupaten OKU.

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap masih terbatasnya ruang dialog yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang seringkali menyebabkan kebijakan publik tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi warga. Dalam konteks ini, peran aktor non-negara seperti Muhammadiyah menjadi penting untuk menjembatani komunikasi dan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Muhammadiyah Kabupaten OKU menjalankan perannya sebagai mediator sosial dalam mendorong dialog antara pemerintah dan warga, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat peran tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberadaan dan peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kehidupan publik di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jakarta). Dalam undang-undang ini, ormas

diakui sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional serta mengawasi jalannya kebijakan publik.

Secara khusus, Pasal 5 huruf b dan c menegaskan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jakarta). Ketentuan ini menunjukkan bahwa ormas seperti Muhammadiyah memiliki legitimasi hukum untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, serta menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah. Dengan demikian, peran Muhammadiyah sebagai mediator sosial dalam konteks demokrasi lokal, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), tidak hanya sah secara sosial tetapi juga didukung oleh kerangka hukum nasional.

Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah dipaparkan, fokus utama dari penelitian ini diarahkan pada upaya memahami bagaimana Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memaknai dan menjalankan perannya sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) dalam konteks lokal. Penelitian ini menelaah bagaimana nilai-nilai dasar organisasi serta strategi kolaboratif yang dikembangkan Muhammadiyah diterapkan dalam menjalin relasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat luas. Selain itu, perhatian juga diberikan pada bentuk-bentuk keterlibatan Muhammadiyah dalam kehidupan pemerintahan di tingkat lokal. Dalam dinamika tersebut, penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan yang muncul dalam proses kemitraan antara Muhammadiyah dan pemerintah daerah, serta bagaimana organisasi ini merumuskan dan menerapkan strategi untuk merespons tantangan tersebut secara konstruktif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Civil Society*

Penelitian ini menggunakan kerangka teori *civil society* dan teori mediasi sosial. Konsep *civil society* merujuk pada ruang sosial di luar negara dan pasar, yang diisi oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam mengartikulasikan kepentingan warga, mengawasi kekuasaan, dan memperkuat partisipasi publik (Cohen & Arato, 1992). Dalam konteks ini, Muhammadiyah dapat diposisikan sebagai bagian dari *civil society* yang memiliki legitimasi sosial dan kapasitas institusional untuk berperan dalam proses demokratisasi lokal.

Teori Mediasi Sosial

Sementara itu, teori mediasi sosial menjelaskan peran aktor-aktor perantara dalam mengelola konflik membangun komunikasi, dan menciptakan ruang dialog antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda (Fisher, 2000). Dalam hal ini, Muhammadiyah dapat berfungsi sebagai *bridge-builder* yang memfasilitasi pertukaran informasi, memperkuat kepercayaan, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menggabungkan kedua kerangka ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Muhammadiyah memainkan peran strategisnya dalam konteks lokal Kabupaten OKU.

Dalam memahami peran Muhammadiyah sebagai mediator sosial dalam konteks demokrasi lokal di Kabupaten OKU, penting untuk terlebih dahulu meninjau dua kerangka teoritik utama yang menjadi landasan penelitian ini: teori *civil society* dan teori mediasi sosial. Teori *civil society* menekankan pentingnya ruang sosial yang berada di luar kendali negara dan pasar, di mana warga negara dapat berorganisasi secara sukarela untuk menyuarakan

kepentingan, melakukan kontrol sosial, dan memperkuat partisipasi politik. Dalam konteks Indonesia, organisasi seperti Muhammadiyah memiliki legitimasi sosial dan kapasitas institusional yang kuat untuk memainkan peran strategis dalam proses demokratisasi lokal. Salim menyebut bahwa pasca-reformasi, masyarakat sipil tumbuh menjadi kekuatan penyeimbang terhadap negara, terutama melalui advokasi dan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik (Salim, 2018). Hikam menambahkan bahwa *civil society* yang sehat dapat mendorong demokrasi deliberatif dengan menciptakan ruang publik yang inklusif dan partisipatif (Hikam, 2016). Asrida, Marta, dan Hadi juga menekankan bahwa hubungan antara *civil society* dan demokrasi bersifat timbal balik, di mana penguatan masyarakat sipil akan memperkuat kualitas demokrasi (Asrida et al., 2021). Dalam hal ini, Muhammadiyah tidak hanya berperan sebagai pengawas kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antara negara dan masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Triwibowo yang melihat gerakan sosial sebagai wahana ekspresi *civil society* dalam memperjuangkan keadilan sosial (Triwibowo, 2017). Sulaiman bahkan menyoroti pentingnya kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan partisipatif (Sulaiman, 2020).

Sementara itu, teori mediasi sosial memberikan perspektif yang lebih spesifik mengenai peran aktor-aktor perantara dalam mengelola konflik, membangun komunikasi, dan menciptakan ruang dialog antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Moore menjelaskan bahwa mediasi sosial adalah proses fasilitasi oleh pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama (Moore, 2016). Fisher dan Ury menekankan pendekatan *principled negotiation*, yaitu negosiasi yang berfokus pada kepentingan bersama, bukan sekadar posisi atau tuntutan (Fisher & Ury, 2015). Dalam konteks lokal seperti Kabupaten OKU, peran Muhammadiyah sebagai mediator sosial menjadi relevan karena organisasi ini memiliki jaringan sosial yang luas dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Abdurrasyid menyatakan bahwa mediasi sosial efektif dalam membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan antara masyarakat dan pemerintah (Abdurrasyid, 2017). Suharto menambahkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada legitimasi dan kepercayaan yang dimiliki oleh mediator di mata para pihak (Suharto, 2019). Yusran juga menekankan pentingnya kapasitas komunikasi dan pemahaman konteks lokal dalam keberhasilan mediasi sosial di tingkat daerah (Yusran, 2022).

Dengan menggabungkan kedua kerangka ini, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Muhammadiyah memainkan peran strategisnya sebagai *civil society* sekaligus mediator sosial dalam mendorong dialog antara pemerintah dan warga di Kabupaten OKU, serta bagaimana peran tersebut berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal yang lebih inklusif dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap peran Muhammadiyah sebagai aktor *civil society* dalam konteks lokal, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Studi ini bertujuan untuk menggali secara komprehensif proses, makna, dan dinamika hubungan antara Muhammadiyah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta mengungkap kontribusi dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi sosial dan advokatifnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman

langsung terkait aktivitas Muhammadiyah dan interaksinya dengan pemerintah daerah. Selain itu, studi ini juga menggunakan analisis literatur akademik yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan organisasi, guna memperkuat kerangka teoritik dan memperdalam pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Kombinasi antara wawancara dan studi literatur ini diharapkan dapat menghasilkan data yang kaya, reflektif, dan mendalam untuk menjelaskan peran strategis Muhammadiyah dalam membangun ruang dialog yang partisipatif dan demokratis di tingkat lokal.

HASIL PEMBAHASAN

Muhammadiyah Memaknai Perannya sebagai *Civil Society*

Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memaknai perannya sebagai bagian dari civil society dengan menempatkan diri sebagai agen perubahan sosial yang berakar pada prinsip-prinsip Islam berkemajuan. Peran ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif strategis, seperti pemberdayaan masyarakat berbasis aset, di mana Muhammadiyah OKU mengelola tanah wakaf yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan pertanian yang bermanfaat secara ekonomi, seperti kebun sawit seluas tujuh hektar di Desa Tubohan. Selain itu, Muhammadiyah aktif mengisi ruang-ruang publik yang belum sepenuhnya dijangkau oleh negara, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Melalui amal usaha dan kegiatan dakwah, organisasi ini juga memperkuat spiritualitas dan moralitas publik, menanamkan nilai-nilai etika sosial dan tanggung jawab kolektif kepada masyarakat (Kader Muda Muhammadiyah, 2023).

Muhammadiyah mampu membangun kepercayaan dari masyarakat maupun pemerintah karena selama lebih dari satu abad organisasi ini konsisten menjaga independensi politik, menolak keterlibatan dalam praktik perebutan kekuasaan, dan tidak memihak pada partai tertentu, sehingga dinilai adil dan dapat dipercaya sebagai penengah. Selain itu, rekam jejak panjang Muhammadiyah dalam pelayanan publik—melalui ribuan sekolah, rumah sakit, kampus, panti sosial, dan aksi kemanusiaan—membuat masyarakat melihatnya sebagai organisasi yang benar-benar memahami kebutuhan rakyat, sementara pemerintah menganggapnya sebagai mitra yang kompeten. Reputasi moral yang kuat, gaya komunikasi moderat, serta kepemimpinan yang dihuni ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat yang dihormati juga memperkuat modal sosial organisasi ini. Tidak hanya itu, kemampuan Muhammadiyah menyusun kajian objektif dan berbasis data menjadikan pandangannya dianggap rasional dan layak dijadikan rujukan dalam penyelesaian persoalan publik. Ditambah lagi, struktur organisasi yang rapi dan berlapis memungkinkan Muhammadiyah menyalurkan aspirasi akar rumput secara terukur kepada pemerintah. Kombinasi seluruh faktor inilah yang menjadikan Muhammadiyah dipercaya oleh kedua belah pihak sehingga efektif berperan sebagai mediator atau penengah dalam berbagai isu sosial.

Dalam menjalin relasi dengan pemerintah dan masyarakat, Muhammadiyah OKU tidak bersikap oposisi, melainkan menjalankan fungsi sebagai mitra kritis yang konstruktif. Strategi kolaborasi yang diterapkan mencakup sinergi dalam program-program pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan umum, sebagaimana tercermin dalam tema Milad ke-113: Memajukan Kesejahteraan Bangsa. Di sisi internal, seluruh majelis di bawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ogan Komering Ulu (OKU) diberdayakan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah dan aktor-aktor lain dilakukan secara

selektif dan berbasis nilai, dengan tetap menjaga independensi ideologis serta konsistensi terhadap prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah OKU untuk menjadi kekuatan moral yang aktif dalam pembangunan daerah tanpa kehilangan jati diri sebagai gerakan dakwah dan tajdid (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022). Hal ini sejalan dengan penuturan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ulu Prof. Dr. Ir. H. Gribaldi, M.Si., pada wawancara Senin 1 Desember 2025 yang menyatakan, bahwa “Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam gerakan dakwah dan kesejahteraan sosial melalui tiga pilar utama: pendidikan, kesehatan, dan sosial.” Ia juga menjelaskan bahwa “Muhammadiyah mengambil bagian dalam masyarakat sosial untuk mensejahterakan melalui keikutannya di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Di Kabupaten OKU, kontribusi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan tercermin dari keberadaan lembaga pendidikan mulai dari PAUD hingga tingkat menengah atas, termasuk SMA dan SMK yang tersebar di Gunung Liwat, Tubohan, Tanjung Lengkayap, dan Baturaja. Di bidang kesehatan, Muhammadiyah mengelola Rumah Sakit Dr. Maulana yang merupakan hibah dari masyarakat. Sementara itu, di sektor sosial, peran organisasi ini diwujudkan melalui pengelolaan panti asuhan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan di masyarakat.”

Nilai-nilai utama yang menjadi fondasi gerakan Muhammadiyah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tercermin kuat dalam setiap aktivitas sosial dan keorganisasiannya. Pertama, prinsip tauhid sosial menjadi landasan utama, di mana nilai keimanan tidak hanya dimaknai secara ritualistik, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pengabdian sosial yang nyata. Bagi Muhammadiyah OKU, melayani masyarakat adalah bagian dari ibadah, sehingga setiap program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dijalankan dengan semangat spiritualitas yang tinggi. Kedua, nilai kemandirian dan keswadayaan mendorong organisasi ini untuk tidak bergantung pada bantuan negara atau partai politik. Sebaliknya, Muhammadiyah lebih mengandalkan kekuatan internal, partisipasi warga, dan pengelolaan aset wakaf secara produktif sebagai sumber daya utama dalam menjalankan misinya. Ketiga, nilai inklusivitas dan keterbukaan menjadi ciri khas Muhammadiyah dalam menjalin relasi sosial. Organisasi ini menjunjung tinggi prinsip pluralisme dan kesetaraan, serta terbuka terhadap kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pemerintah, organisasi keagamaan lain, dan komunitas masyarakat sipil, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam berkemajuan. Ketiga nilai ini menjadikan Muhammadiyah OKU sebagai kekuatan moral dan sosial yang adaptif, mandiri, dan relevan dalam dinamika pembangunan daerah.

Prof. Dr. Ir. H. Gribaldi, M.Si. menegaskan bahwa nilai-nilai utama yang menjadi dasar perjuangan Muhammadiyah terletak pada identitasnya sebagai gerakan sosial sekaligus gerakan dakwah. Dalam pandangannya, “Muhammadiyah tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus berinteraksi dengan pemerintah, berinteraksi dengan masyarakat,” melalui pola hubungan yang saling menguntungkan dan bersifat simbiosis mutualisme. Interaksi ini menjadi fondasi penting yang memungkinkan Muhammadiyah tumbuh besar dan berperan aktif, baik dalam ranah pemerintahan maupun masyarakat sipil. Ia menambahkan bahwa gerakan sosial, amal, dan dakwah merupakan tiga pilar utama yang menopang peradaban organisasi Muhammadiyah dan menjadi penentu arah perjuangannya hingga saat ini.

Dalam wawancara yang kami lakukan, Prof. Dr. Ir. H. Gribaldi, M.Si. menekankan pentingnya sinergitas antara Muhammadiyah dan pemerintah daerah sebagai strategi utama dalam pengembangan organisasi. Ia menyatakan bahwa “kami yakin tanpa berkolaborasi dengan

pemerintah, Muhammadiyah tidak bisa berkembang dengan baik.” Prinsip ini diwujudkan melalui partisipasi aktif Muhammadiyah dalam berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah saat ini berasal dari Muhammadiyah dan turut berperan dalam kegiatan dakwah. Selain itu, Prof. Gribaldi sendiri secara konsisten hadir dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa komunikasi dan silaturahmi yang intensif dengan pemerintah menjadi kunci terjalinnya sinergisitas yang produktif. Tanpa keterlibatan aktif dalam kegiatan pemerintah, menurutnya, organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah berisiko terpinggirkan. Oleh karena itu, strategi Muhammadiyah adalah mendukung dan menjunjung tinggi setiap program pemerintah yang sejalan dengan misi kesejahteraan sosial.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam Kehidupan Pemerintahan di Masyarakat

Keterlibatan Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dalam proses pembangunan dan kebijakan publik tidak bersifat simbolik atau seremonial semata, melainkan mencerminkan peran substantif sebagai aktor masyarakat sipil yang aktif, deliberatif, dan transformatif. Dalam konteks lokal, Muhammadiyah memosisikan dirinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah, sekaligus sebagai kanal artikulasi aspirasi masyarakat akar rumput. Keterlibatan ini terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari partisipasi formal dalam forum-forum perencanaan pembangunan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), hingga kehadiran tokoh-tokohnya dalam lembaga-lembaga strategis seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (Salsabilla, 2025). Melalui posisi-posisi ini, Muhammadiyah tidak hanya menyuarakan kepentingan umat, tetapi juga turut memengaruhi arah kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Lebih jauh, Muhammadiyah OKU menjalankan fungsi advokatif melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), yang berperan sebagai think tank internal dalam merumuskan sikap organisasi terhadap isu-isu strategis, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan. Fungsi ini diperkuat oleh jejaring amal usaha Muhammadiyah (AUM) yang tersebar di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, yang tidak hanya menjadi instrumen pelayanan publik, tetapi juga wahana pengumpulan aspirasi dan penguatan kapasitas warga (Okusatu.id., 2023). Dalam konteks ini, Muhammadiyah berperan sebagai intermediary institution penengah antara negara dan masyarakat yang menjembatani kepentingan warga dengan struktur kekuasaan formal melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif.

Strategi relasional Muhammadiyah dengan pemerintah daerah dibangun di atas prinsip simbiosis mutualisme, di mana kolaborasi tidak dimaknai sebagai subordinasi, melainkan sebagai bentuk sinergi nilai dan tujuan. Muhammadiyah secara aktif mendukung program-program pemerintah yang sejalan dengan misi kesejahteraan sosial, namun tetap menjaga independensi ideologis dan otonomi gerakan. Pendekatan ini memungkinkan Muhammadiyah untuk tetap kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik, sekaligus adaptif dalam merespons dinamika sosial-politik lokal. Dengan demikian, keterlibatan Muhammadiyah dalam pembangunan dan kebijakan publik di Kabupaten OKU mencerminkan model partisipasi masyarakat sipil yang etis, reflektif, dan berorientasi pada transformasi sosial yang berkelanjutan.

Prof. Dr. Ir. H. Gribaldi, M.Si., selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ulu, menegaskan bahwa Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam menyerap dan menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa

“setiap permasalahan yang ada pada masyarakat, masukan yang ada pada masyarakat merupakan himpunan oleh Muhammadiyah,” yang kemudian disalurkan melalui berbagai majelis yang dimiliki organisasi, seperti Majelis Sosial dan Majelis Lingkungan. Menurutnya, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat telah terwadahi dalam struktur kelembagaan Muhammadiyah, sehingga organisasi ini memiliki kedekatan yang kuat dengan dinamika sosial di tingkat akar rumput. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya interaksi yang intensif dan berkesinambungan dengan berbagai institusi pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten OKU, Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI. “Kami selalu menjalin komunikasi dengan para pemerintah itu, sehingga kalau ada keluhan masyarakat, kalau ada permasalahan yang ada di masyarakat, maka kami mudah menyalurkannya ke pemerintah daerah,” ujarnya. Hubungan yang baik ini menjadi prasyarat penting bagi Muhammadiyah untuk dapat menjalankan perannya secara efektif sebagai jembatan antara masyarakat dan negara.

Sebagai bagian dari *civil society* yang berakar kuat dalam nilai-nilai Islam berkemajuan, Muhammadiyah Kabupaten OKU memainkan peran penting sebagai mediator sosial—yakni sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam merespons dinamika sosial, konflik, serta kebijakan publik. Peran ini dijalankan melalui pendekatan moral, edukatif, dan dialogis yang menekankan pada stabilitas sosial dan penyelesaian masalah secara damai.

Dalam konteks lokal, peran mediasi Muhammadiyah tampak nyata dalam berbagai peristiwa sosial. Salah satu contohnya adalah keterlibatan Muhammadiyah dalam merespons aksi demonstrasi di DPRD Kabupaten OKU terkait tuntutan 17+8. Dalam situasi yang berpotensi memicu ketegangan, Muhammadiyah mengambil langkah proaktif dengan memberikan edukasi publik melalui media sosial dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong penyampaian aspirasi secara konstitusional yang berupa imbauan untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi situasi. “Itu dilakukan juga dari para pimpinan Muhammadiyah kepada warga Muhammadiyah dan juga bukan hanya warga Muhammadiyah,” ujar Prof. Dr. Ir. H. Gribaldi, M.Si., menegaskan bahwa pencerahan publik dilakukan secara luas dan inklusif. Selain itu, Muhammadiyah juga menjalin dialog dengan pemerintah daerah dan melibatkan elemen kader muda seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dalam proses advokasi. IMM turut memberikan masukan kepada peserta aksi agar tidak bertindak anarkis dan menyampaikan aspirasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam memperkuat peran sebagai penengah sosial dan penjaga etika publik dalam ruang demokrasi lokal seraya menekankan pentingnya komunikasi yang menyejukkan dalam ruang publik (wawancara, 1 Desember 2025).

Selain itu, Muhammadiyah juga memfasilitasi dialog antara elemen masyarakat dan. Peran mediasi Muhammadiyah juga diperkuat oleh struktur kelembagaan internal yang responsif terhadap isu-isu sektoral. Majelis-majelis seperti Majelis Sosial, Majelis Lingkungan, dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) menjadi kanal formal untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan menyalurkannya secara sistematis kepada pemerintah. Hubungan yang terjalin baik antara Muhammadiyah dan institusi pemerintah daerah, termasuk dengan kepolisian, kejaksaan, dan TNI, memungkinkan proses mediasi berjalan secara efektif dan konstruktif.

Dengan demikian, Muhammadiyah OKU tidak hanya berperan sebagai pelaksana program sosial, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat kohesi masyarakat, dan memastikan bahwa aspirasi warga tersampaikan secara etis dan produktif. Peran ini menjadikan Muhammadiyah sebagai kekuatan moral yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan negara dalam kerangka demokrasi yang beradab.

Tantangan dan Strategi Muhammadiyah

Kemitraan antara Muhammadiyah dan pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan bentuk relasi strategis antara aktor masyarakat sipil dan institusi negara dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berkeadilan. Namun, relasi ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang bersifat struktural, kultural, maupun politis. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan orientasi nilai dan prioritas antara kedua pihak. Muhammadiyah, sebagai gerakan dakwah dan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam berkemajuan, menekankan pentingnya keadilan sosial, etika publik, dan pemberdayaan masyarakat akar rumput. Sementara itu, pemerintah daerah sering kali beroperasi dalam kerangka birokrasi yang pragmatis dan terikat pada siklus politik elektoral. Ketegangan ini dapat muncul ketika kebijakan publik dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas atau bertentangan dengan prinsip moral yang dijunjung tinggi oleh Muhammadiyah (Kahmad, 2024).

Selain itu, keterbatasan komunikasi struktural juga menjadi hambatan dalam menjalin kemitraan yang efektif. Tidak semua majelis atau lembaga di bawah Muhammadiyah memiliki akses langsung ke pengambil kebijakan, sehingga penyampaian aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh organisasi ini tidak selalu terakomodasi secara optimal dalam proses perumusan kebijakan daerah. Hal ini diperparah oleh kurangnya mekanisme formal yang menjamin partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam siklus kebijakan publik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (The Conversation, 2023). Di sisi lain, dinamika politik lokal seperti pergantian kepala daerah, afiliasi politik, dan kepentingan kelompok tertentu juga dapat memengaruhi stabilitas kemitraan. Muhammadiyah, yang secara prinsipil menjaga jarak dari politik praktis, harus cermat dalam menjaga netralitas sambil tetap menjalin relasi strategis dengan pemerintah.

Meski menghadapi tantangan tersebut, Muhammadiyah dan pemerintah daerah OKU terus berupaya mengevaluasi dan memperkuat efektivitas kemitraan mereka. Evaluasi ini dilakukan melalui partisipasi aktif Muhammadiyah dalam forum-forum resmi seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), pelibatan tokoh-tokohnya dalam lembaga keagamaan dan sosial seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta pengakuan eksplisit dari pemerintah terhadap kontribusi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Di sisi internal, Muhammadiyah memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pemberdayaan majelis-majelis tematik yang responsif terhadap isu-isu lokal, seperti Majelis Sosial dan Majelis Lingkungan. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Ir. H. Gribaldi, M.Si., “kalau ada keluhan masyarakat... kami mudah menyalurkannya ke pemerintah daerah” karena hubungan yang telah terjalin baik antara Muhammadiyah dan institusi pemerintah (wawancara, 1 Desember 2025).

Dengan demikian, kemitraan antara Muhammadiyah dan pemerintah daerah di Kabupaten OKU mencerminkan dinamika relasi antara masyarakat sipil dan negara yang kompleks namun produktif. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, kedua pihak menunjukkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, dialogis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Keberhasilan kemitraan ini sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk menjaga komunikasi yang terbuka, mengelola perbedaan secara konstruktif, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan sektoral atau politis.

Prof. Dr. Ir. H. Gribaldi, M.Si., menyoroti tantangan besar yang dihadapi Muhammadiyah di era digital, khususnya dalam menghadapi derasnya arus informasi di media sosial. Ia menyatakan bahwa “sekarang ini kita berpacu dengan teknologi, kemajuan teknologi. Ini tantangan berat bagi Muhammadiyah,” seraya menekankan bahwa masyarakat cenderung lebih mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial, tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dituntut untuk tidak tertinggal dan harus mampu memberikan kontribusi nyata sebagai mediator sosial melalui platform digital. “Kita juga harus memberikan kontribusi pada masyarakat itu dalam hal sebagai mediator sosial tadi melalui media sosial,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penyebaran informasi yang cepat dan tidak terverifikasi dapat menimbulkan keresahan sosial, sehingga Muhammadiyah perlu hadir memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Tantangan ini, menurutnya, bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut peran strategis Muhammadiyah dalam membentuk kesadaran publik yang kritis dan etis di tengah era disinformasi.

Strategi Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan media sosial dan kemajuan teknologi digital difokuskan pada transformasi dakwah digital, penguatan literasi media, dan revitalisasi peran kader sebagai agen pencerahan di ruang publik. Dalam menghadapi era disrupsi informasi, Muhammadiyah menyadari bahwa media sosial telah menjadi arena baru dalam pembentukan opini publik dan penyebaran nilai. Oleh karena itu, organisasi ini mengembangkan pendekatan dakwah berbasis teknologi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan transformatif. Salah satu strategi utama adalah penguatan dakwah digital melalui optimalisasi kanal media resmi, pelatihan konten kreatif, dan pengembangan narasi Islam berkemajuan yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat digital. Sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Anwar, Muhammadiyah perlu mengembangkan metode dakwah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi agar pesan-pesan keislaman tetap relevan dan menjangkau generasi muda secara efektif (Anwar, 2016).

Selain itu, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya literasi media sebagai bagian dari misi pencerahan umat. Literasi ini tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan media digital, tetapi juga mencakup aspek etika, kritisisme, dan tanggung jawab sosial dalam menyebarkan informasi. Menurut Alfian, tantangan utama Muhammadiyah di era digital adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif di kalangan warga persyarikatan untuk tidak terjebak dalam arus disinformasi dan polarisasi opini yang kerap terjadi di media sosial (Alfian, 2018). Oleh karena itu, pendidikan literasi digital menjadi bagian integral dari program-program pengajian, pelatihan kader, dan aktivitas komunitas Muhammadiyah.

Strategi lainnya adalah revitalisasi peran kader sebagai agen perubahan sosial yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman dengan realitas digital. Kader Muhammadiyah didorong untuk aktif di ruang publik digital, tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen narasi yang mencerahkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Haedar Nashir yang menekankan bahwa kader Muhammadiyah harus menjadi pelopor dalam membangun budaya digital yang sehat, kritis, dan berkeadaban (Nashir, 2020). Dengan demikian, strategi Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan teknologi digital tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berorientasi pada transformasi sosial yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Muhammadiyah OKU memosisikan dirinya sebagai mitra kritis yang konstruktif terhadap pemerintah, bukan sebagai oposisi. Peran mediasi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi substantif, diwujudkan melalui Advokasi Kebijakan dan penyaluran aspirasi masyarakat akar rumput secara terukur melalui majelis-majelis tematik seperti Majelis Sosial dan LHKP. Fasilitasi Dialog Publik, termasuk memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat, seperti dalam kasus demonstrasi di DPRD, untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung secara konstitusional dan damai.

Keberhasilan peran ini didukung oleh independensi politik yang konsisten, rekam jejak pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, sosial) yang panjang, dan reputasi moral yang kuat. Faktor-faktor ini menjadikan Muhammadiyah dipercaya oleh kedua belah pihak sebagai penengah yang adil. Peran ini sah secara hukum berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 yang mengakui fungsi ormas sebagai penyalur aspirasi, dan diperkuat oleh nilai internal Muhammadiyah, yaitu tauhid sosial (melayani adalah ibadah), kemandirian, dan inklusivitas.

Terdapat tantangan dalam menjalin kemitraan yang efektif akibat perbedaan orientasi nilai dan prioritas (nilai idealis Muhammadiyah vs. Pragmatisme birokrasi). Selain itu, keterbatasan akses formal ke pengambil kebijakan dan kurangnya mekanisme formal yang menjamin partisipasi *civil society* menghambat akomodasi aspirasi secara. Tantangan terbesar saat ini adalah arus informasi di media sosial yang cepat dan tidak terverifikasi, yang mudah dipercaya masyarakat dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Hal ini menuntut Muhammadiyah untuk bertransformasi dalam dakwah digital dan penguatan literasi media agar tetap relevan.

Secara kritis, studi ini menegaskan bahwa peran mediasi Muhammadiyah OKU tidak hanya berdampak pada penyaluran aspirasi, tetapi juga pada penguatan kualitas demokrasi lokal melalui terciptanya ruang publik yang partisipatif dan beradab. Namun, keberlanjutan peran ini sangat bergantung pada kemampuan organisasi dan pemerintah untuk:

1. Menginstitusionalisasi Akses: Pemerintah perlu menciptakan mekanisme formal yang lebih inklusif dan transparan untuk menjamin partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam seluruh siklus kebijakan, dari perencanaan (Musrenbang) hingga evaluasi.
2. Penguatan Kapasitas Internal: Muhammadiyah harus terus memperkuat kapasitas kelembagaan, terutama dalam bidang literasi digital dan dakwah digital, untuk mempertahankan legitimasi moralnya di tengah disrupsi teknologi dan melawan disinformasi.

Pada akhirnya, model kemitraan “simbiosis mutualisme” antara Muhammadiyah dan Pemerintah OKU menunjukkan potensi besar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, asalkan kedua pihak mampu mengelola perbedaan secara konstruktif dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan sektoral.

Berdasarkan keseluruhan uraian, dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memainkan peran strategis sebagai aktor masyarakat sipil yang aktif, deliberatif, dan transformatif dalam pembangunan daerah, kemitraan dengan pemerintah, serta penguatan etika publik di era digital. Peran ini dijalankan melalui tiga dimensi utama: pemaknaan identitas sebagai *civil society*, keterlibatan dalam kebijakan publik, dan respons terhadap tantangan teknologi informasi.

Pertama, Muhammadiyah OKU memaknai dirinya sebagai agen perubahan sosial berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan. Hal ini diwujudkan melalui pengelolaan aset wakaf, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta penguatan nilai-nilai spiritualitas, kemandirian, dan inklusivitas. Organisasi ini menjaga independensi politik dan membangun kepercayaan publik melalui rekam jejak pelayanan dan struktur kelembagaan yang kuat.

Kedua, keterlibatan Muhammadiyah dalam kebijakan publik tidak bersifat simbolik, melainkan substantif. Muhammadiyah hadir dalam forum-forum formal seperti Musrenbang, serta melalui tokoh-tokohnya di MUI dan FKUB. Fungsi advokatif dijalankan oleh LHKP, sementara jaringan amal usaha menjadi sarana penguatan kapasitas warga. Strategi relasional Muhammadiyah dengan pemerintah dibangun atas prinsip simbiosis mutualisme—kolaboratif namun tetap kritis dan independen.

Ketiga, dalam menghadapi tantangan era digital, Muhammadiyah mengembangkan strategi dakwah digital, literasi media, dan pemberdayaan kader sebagai produsen narasi publik yang mencerahkan. Organisasi ini menyadari bahwa media sosial adalah arena baru pembentukan opini dan penyebaran nilai, sehingga perlu hadir sebagai mediator sosial yang mampu menjaga stabilitas dan etika publik di tengah arus disinformasi.

Dengan demikian, Muhammadiyah OKU tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan sosial, tetapi juga menjadi kekuatan moral dan institusi penengah yang menjembatani kepentingan masyarakat dan negara. Peran ini dijalankan secara adaptif, kolaboratif, dan berbasis nilai, menjadikan Muhammadiyah sebagai pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, berkeadaban, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazyid, P. (2017). *Mediasi dalam resolusi konflik sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Alfian. (2018). *Literasi media dan tantangan dakwah Muhammadiyah di era digital*. Malang: Penerbit UMM Press.
- Anwar, S. (2016). *Fikih informasi: Menjawab tantangan dakwah di era digital*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). *Civil society and political theory*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Fisher, R. J. (2000). *Interactive conflict resolution*. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
- Fisher, R., & Ury, W. (2015). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in* (3rd ed.). New York: Penguin Books.
- Hikam, M. A. S. (2016). *Demokrasi dan civil society*. Jakarta: LP3ES.
- Moore, C. W. (2016). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Nashir, H. (2020). *Islam berkemajuan: Dari Muhammadiyah untuk peradaban*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Salim, A. (2018). *Masyarakat sipil dan demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulaiman, A. (2020). *Kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pembangunan daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2019). *Mediator sosial dalam pembangunan partisipatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Triwibowo, D. (2017). *Gerakan sosial: Wahana civil society bagi demokratisasi*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Yusran, M. (2022). *Mediasi sosial dan resolusi konflik di tingkat lokal*. Makassar: Pustaka Pelita.

- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil society, demokrasi dan demokratisasi. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20(2), 225-240.
- Kader Muda Muhammadiyah. (2023, Oktober 12). 5 fokus utama Muhammadiyah: Pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, dan pemberdayaan umat. <https://kmm.or.id/information/5-fokus-utama-muhammadiyah-pendidikan-kesehatan-sosial-dakwah-dan-pemberdayaan-umat>
- Kahmad, D. (2024, Juli 10). Tantangan Muhammadiyah Abad 21 menurut Dadang Kahmad. Muhammadiyah.or.id. <https://muhammadiyah.or.id/2024/07/tantangan-muhammadiyah-abad-21-menurut-dadang-kahmad/>
- Okusatu.id. (2023, Juni 3). Besarkan Muhammadiyah di OKU, begini triknya. <https://okusatu.id/besarkan-muhammadiyah-di-oku-begini-triknya>
- Salsabilla, S. (2025, November 30). Peran organisasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/salsabilla/peran-organisasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik>
- The Conversation. (2023, Agustus 16). Abad ke-2 peran Muhammadiyah dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Apa saja tantangan ke depannya? <https://theconversation.com/abad-ke-2-peran-muhammadiyah-dalam-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia-apa-saja-tantangan-ke-depannya-210742>
- Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2022). Peran Muhammadiyah dalam transformasi sosial dan pendidikan. Prosiding Seminar Nasional. <https://proceedings.ums.ac.id/lppik/article/view/5107>